

Analisis Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka di 38 Provinsi Periode 2021-2025

Hatma Aura Rahmah ^{1*}, Tamamudin ², Ayatullah Sadali ³

^{1 2 3} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

* hatmarahmaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika spasial dan temporal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 38 provinsi di Indonesia selama periode 2021–2025, di tengah penurunan TPT secara nasional yang belum diikuti dengan pemerataan pemulihan pasar kerja. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami ketimpangan regional dalam pengangguran terbuka sebagai cerminan ketidakmerataan pembangunan, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi dokumenter. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah, serta hasil kajian dari lembaga independen selama periode lima tahun. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi TPT, serta analisis spasial deskriptif untuk memetakan pola dan arah pergeseran pengangguran antarwilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi di wilayah barat, seperti Jawa Barat dan Banten, mengalami TPT tinggi akibat tekanan urbanisasi, pertumbuhan penduduk usia kerja, dan stagnasi daya serap sektor industri. Sebaliknya, wilayah timur seperti Papua menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya mobilitas kerja, dan lemahnya lembaga pelatihan kerja. Provinsi Bali secara konsisten mencatat TPT terendah karena kekuatan sektor jasa, terutama pariwisata, serta sistem pelatihan vokasional yang adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangguran terbuka tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh aspek demografi, geografis, dan kelembagaan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi ketenagakerjaan berbasis lokal yang adaptif terhadap kondisi wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan secara lebih inklusif.

Kata Kunci: *Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Spasial, Ketimpangan Regional*

Pendahuluan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utama dalam mengukur tekanan ketenagakerjaan di suatu negara. Di Indonesia, TPT mengalami penurunan secara nasional dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah puncak pandemi COVID-19 yang mengguncang sektor ekonomi dan ketenagakerjaan secara signifikan (Alam et al., 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). TPT Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76%, yang merupakan angka terendah sejak krisis moneter 1998 dan pandemi global 2020. Capaian ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, didorong oleh stimulus kebijakan, program pelatihan tenaga kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan yang diupayakan oleh pemerintah (Arsyad & Ahmad, 2024). Namun demikian, keberhasilan ini

tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah. Ketimpangan regional dalam tingkat pengangguran masih sangat terlihat, di mana sejumlah provinsi di Indonesia bagian timur masih mengalami tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi di Pulau Jawa atau Sumatera (Sutrisno, 2021).

Kesenjangan spasial tersebut menunjukkan adanya disparitas struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Terdapat perbedaan signifikan dalam kapasitas ekonomi, akses infrastruktur, ketersediaan pendidikan kejuruan, dan dinamika sosial antarprovinsi yang memengaruhi tingkat serapan tenaga kerja (Qomariyah, 2022). Oleh karena itu, meskipun angka TPT nasional menunjukkan tren positif, secara spasial masih terdapat provinsi-provinsi yang mengalami stagnasi atau bahkan peningkatan pengangguran terbuka (Tutupoho, 2019). Persoalan ini menuntut adanya pendekatan analitis yang tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga mempertimbangkan dimensi spasial dan temporal secara bersamaan, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah (Balqis et al., 2021).

Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah untuk menekan angka pengangguran, seperti program vokasi dan pengembangan wirausaha muda, insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga investasi pada sektor padat karya (Arjuna et al., 2023). Namun, efektivitas program ini sering kali terhambat oleh keterbatasan data proyeksi TPT yang akurat di tingkat provinsi. Sementara BPS rutin merilis data TPT secara berkala, proyeksi jangka menengah mengenai bagaimana arah perkembangan TPT hingga tahun 2025 masih sangat terbatas, apalagi jika dikaitkan dengan sebaran wilayah dan karakteristik masing-masing provinsi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran (Handayani, 2024).

Penelitian sebelumnya banyak mengkaji faktor penyebab pengangguran, baik dari perspektif makro ekonomi maupun sosial. Peran sektor informal dan menemukan bahwa sektor ini masih belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja di wilayah Indonesia timur (Jabani et al, 2024). Sementara itu, memfokuskan analisis pada pengaruh pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja, namun belum menyentuh aspek spasial secara spesifik (Haikutty et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman dasar dinamika ketenagakerjaan nasional, namun masih terbatas pada level nasional atau regional tertentu dan belum mengintegrasikan variabel spasial dan temporal secara bersamaan.

Beberapa studi terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif murni dan cenderung mengabaikan faktor kelembagaan dan sosial kultural di masing-masing daerah. Padahal, dinamika ketenagakerjaan di setiap provinsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau investasi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial lokal, struktur pasar kerja informal, kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi pendukung ketenagakerjaan, dan efektivitas pelaksanaan program nasional di tingkat local (Abdi et al, 2024). Konteks ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih interpretatif dan holistik dalam memahami pola dan arah perubahan TPT di Indonesia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan spasial-temporal dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya menggunakan potret statis tahunan atau menganalisis tren secara nasional, penelitian ini menyajikan peta dinamis proyeksi TPT untuk 38 provinsi selama periode 2021 hingga 2025. Dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan kementerian terkait, serta ditelaah melalui pendekatan interpretatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana perubahan TPT terjadi di setiap provinsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi determinan utamanya. Analisis ini bukan hanya bersifat

deskriptif, tetapi juga menjelaskan pola-pola distribusi TPT serta potensi intervensi kebijakan berdasarkan sebaran wilayah (Yani & Ruslan, 2025).

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan akan penyusunan data prediktif yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan memetakan arah perubahan TPT, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya dalam hal prioritas penyerapan tenaga kerja, pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal, dan penguatan peran lembaga pendidikan kejuruan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana dinamika spasial tingkat pengangguran terbuka antarprovinsi di Indonesia selama periode 2021–2025; serta bagaimana pola sebaran provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dan terendah yang menunjukkan arah pembangunan tenaga kerja yang tidak seragam. Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi bersifat umum dan terpusat, tetapi lebih berbasis bukti dan memperhatikan konteks daerah masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan arah perubahan tingkat pengangguran terbuka secara spasial di 38 provinsi Indonesia selama periode 2021 hingga 2025, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola tersebut. Pendekatan yang digunakan berusaha menggabungkan analisis statistik tren historis dengan pendekatan kontekstual yang memperhitungkan aspek sosial dan kelembagaan di setiap daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi ketenagakerjaan berbasis spasial, sekaligus menawarkan dasar kebijakan yang konkret dan berkelanjutan dalam menurunkan angka pengangguran terbuka secara lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi dokumenter. Desain penelitian ini dipilih untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana arah proyeksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di 38 provinsi Indonesia dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Desain ini memungkinkan peneliti menelaah dinamika TPT secara kontekstual dan menyeluruh tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang dikaji. Fokus utama diarahkan pada pemetaan pola dan perubahan tingkat pengangguran secara spasial, serta mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan regional yang memengaruhi perbedaan antarwilayah. Pendekatan ini relevan untuk menggambarkan fenomena yang kompleks dan bersifat multi-dimensional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal (Creswell, 2017).

Subjek dalam penelitian ini adalah data tingkat pengangguran terbuka dari 38 provinsi di Indonesia yang diperoleh secara berurutan setiap tahun selama periode 2021–2025. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), seperti *Berita Resmi Statistik* dan *Sakernas* (Survei Angkatan Kerja Nasional). Data tambahan diperoleh dari dokumen perencanaan daerah, laporan kementerian, serta kajian lembaga penelitian independen seperti SMERU dan LIPI. Penggunaan data sekunder berskala nasional ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang luas dan representatif dari dinamika pengangguran terbuka di tingkat provinsi, yang relevan untuk keperluan analisis spasial dan temporal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data melibatkan pencatatan sistematis terhadap nilai TPT tahunan, identifikasi tren pergerakan, serta penelusuran program dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku pada tiap daerah. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar catatan analisis dokumen yang dikembangkan secara manual. Instrumen ini berisi kategori data seperti angka TPT, tahun, wilayah, program ketenagakerjaan, dan isu kontekstual daerah. Prosedur ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan ketelitian untuk menjaga validitas informasi, sejalan dengan prinsip validitas dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Creswel, 2017).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis spasial deskriptif. Analisis isi digunakan untuk menginterpretasi faktor-faktor yang memengaruhi TPT berdasarkan narasi dalam dokumen kebijakan dan laporan regional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dan keterkaitan antarvariabel sosial-ekonomi yang seringkali tidak tampak secara kuantitatif. Sementara itu, analisis spasial dilakukan dengan membandingkan tren perubahan TPT antarprovinsi dari tahun ke tahun. Data disusun secara kronologis menurut tahun dan wilayah, kemudian dipetakan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan kecenderungan, ketimpangan, dan arah perubahan. Teknik ini sejalan dengan pendekatan geospasial dalam kajian sosial yang dikembangkan oleh peneliti yang menyatakan bahwa pola geografis dapat mengungkap dinamika sosial yang tidak terdeteksi dalam model statistik tradisional (Latifah, 2014).

Pengembangan metode dalam penelitian ini juga mencakup penggunaan *framework triangulasi* untuk menjamin keabsahan interpretasi, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dokumen dan menyesuaikannya dengan konteks kebijakan nasional dan regional. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti wilayah geografis, tren tahun tertentu, serta kebijakan strategis yang dicanangkan pemerintah daerah. Reduksi informasi dilakukan untuk menyaring data yang relevan dan signifikan terhadap tujuan analisis, yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk pola atau kecenderungan yang mencerminkan arah proyeksi TPT.

Langkah-langkah analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari kategorisasi data, reduksi informasi, interpretasi pola, hingga penyusunan kesimpulan awal. Seluruh prosedur ini dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga memungkinkan replikasi penelitian oleh peneliti lain yang memiliki akses terhadap sumber data yang sama. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data spasial dan dokumentasi kebijakan yang akurat.

Hasil

Dinamika Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi

Tabel 1 menunjukkan jumlah angkatan kerja terbesar di lima provinsi di Indonesia. Data ini menggambarkan konsentrasi tenaga kerja di wilayah yang memiliki populasi ekonomi aktif paling banyak. Informasi tersebut penting untuk memahami distribusi pasar tenaga kerja dan kebutuhan pengelolaan ketenagakerjaan. Provinsi dengan angkatan kerja terbanyak memegang peranan kunci dalam dinamika ekonomi nasional. Analisis data ini menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

Tabel 1. Jumlah angkatan kerja terbanyak di 5 provinsi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Jumlah Angkatan Kerja (Juta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jawa Barat	24,74	25,57	25,39	26,18	26,80
2.	Jawa Timur	22,31	22,86	23,86	24,38	24,76
3.	Jawa Tengah	18,96	19,47	21,06	21,90	22,84
4.	Sumatera Utara	7,51	7,66	8,02	8,18	8,10
5.	Banten	6,26	6,46	5,96	6,05	6,21

Berdasarkan data pada Tabel 1, Jawa Barat menempati posisi teratas selama periode 2021 hingga 2025, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 26,80 juta jiwa pada tahun 2025. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di posisi kedua dan ketiga dengan jumlah angkatan kerja masing-masing sebesar 24,76 juta dan 22,84 juta jiwa pada tahun yang sama. Hal ini mencerminkan bahwa pulau Jawa menjadi pusat konsentrasi penduduk serta pusat aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia. Faktor ini didukung oleh keberadaan lapangan kerja yang lebih banyak serta pusat-pusat perekonomian di wilayah tersebut.

Kondisi tersebut memengaruhi pola pengangguran terbuka di Indonesia, karena provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbesar juga menghadapi tantangan lebih besar dalam menyerap tenaga kerja. Ketimpangan kapasitas penyerapan tenaga kerja antarwilayah menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika pengangguran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengangguran dapat menyebabkan pergeseran sektoral, atau setidaknya mempercepatnya (Kurniawan et al, 2025). Pengangguran dapat menjadi indikator adanya perubahan struktural dalam perekonomian, juga dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pergeseran sektoral karena mendorong tenaga kerja untuk berpindah ke sektor-sektor yang lebih berkembang (Budhijana, 2019). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap distribusi angkatan kerja di wilayah-wilayah ini sangat diperlukan untuk merancang strategi pengurangan pengangguran yang efektif dan berkelanjutan. Tabel 2 memperlihatkan lima provinsi dengan jumlah angkatan kerja terendah di Indonesia pada periode 2021 hingga 2025.

Tabel 2. Jumlah angkatan kerja terendah di 5 provinsi di Indonesia

No.	Nama Provinsi	Jumlah Angkatan Kerja (Ribu)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kalimantan Utara	354,3	370,0	387,8	393,7	390,7
2.	Papua Barat	513,6	515,3	592,8	302,5	308,1
3.	Maluku Utara	596,8	609,2	663,2	689,2	693,1
4.	Gorontalo	596,9	630,5	651,4	652,5	634,9
5.	Sulawesi Barat	708,7	749,4	760,2	778,3	789,6

Data ini menggambarkan wilayah dengan populasi angkatan kerja yang relatif kecil dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi terendah dengan jumlah angkatan kerja sekitar 390 ribu jiwa pada tahun 2025. Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat juga termasuk dalam kategori provinsi dengan angkatan kerja terkecil, meskipun mengalami tren peningkatan jumlah angkatan kerja selama periode tersebut. Fenomena ini mencerminkan karakteristik demografis dan geografis wilayah tersebut. Provinsi-provinsi dengan jumlah angkatan kerja rendah umumnya memiliki wilayah yang luas namun berpenduduk jarang serta tingkat urbanisasi yang rendah. Kondisi geografis yang sulit diakses serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengembangan pasar tenaga kerja. Daerah perbatasan seringkali kesulitan dalam menarik tenaga kerja yang kompeten karena rendahnya daya tarik wilayah tersebut dibandingkan dengan daerah pusat yang lebih berkembang (Wika, 2024). Selain itu, struktur ekonomi yang didominasi sektor

primer seperti pertanian dan perikanan juga berkontribusi pada jumlah angkatan kerja yang terbatas dan cenderung tidak tercatat secara formal.

Perbedaan signifikan antara provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbesar dan terkecil memperlihatkan ketimpangan spasial yang kuat di pasar tenaga kerja Indonesia. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, agar intervensi pembangunan ekonomi dapat lebih merata dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas di wilayah dengan angkatan kerja rendah. Strategi pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi lokal akan membantu mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh provinsi (Azizah et al., 2024).

Perbedaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga antarwilayah besar di Indonesia. Tabel 3 menampilkan provinsi dengan TPT tertinggi di tiga wilayah utama: timur, tengah, dan barat Indonesia dari tahun 2021 hingga 2025. Data ini memperkuat gambaran tentang ketimpangan spasial dalam penyebaran pengangguran terbuka serta mencerminkan karakteristik regional yang berbeda-beda dalam menyerap tenaga kerja.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Paling Tinggi Di Wilayah Timur, Tengah dan Barat Indonesia

No.	Wilayah	Tahun	Provinsi	Jumlah (%)
1.	Timur	2021	Sulawesi Utara	7,06
		2022	Maluku	6,88
		2023	Maluku	6,31
		2024	Papua	6,48
		2025	Papua	6,92
2.	Tengah	2021	Kalimantan Timur	6,83
		2022	Kalimantan Timur	5,71
		2023	Kalimantan Timur	5,31
		2024	Kalimantan Timur	5,14
		2025	Kalimantan Timur	5,33
3.	Barat	2021	Jawa Barat	9,82
		2022	Banten	8,09
		2023	Banten	7,97
		2024	Jawa Barat	6,75
		2025	Kepulauan Riau	6,89

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa wilayah timur menunjukkan fluktuasi TPT yang cukup signifikan. Sulawesi Utara tercatat memiliki TPT tertinggi pada 2021 sebesar 7,06 persen. Maluku kemudian mengambil alih posisi tersebut pada 2022 dan 2023 dengan angka di atas 6 persen. Pada 2024 dan 2025, Papua menempati posisi tertinggi di wilayah timur dengan TPT mencapai 6,92 persen. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan dominasi sektor informal. Kondisi geografis dan kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan menjadi penyebab utama kesulitan penyediaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan.

Wilayah tengah, Kalimantan Timur secara konsisten memiliki TPT tertinggi dari 2021 hingga 2025, meskipun tren angkanya menurun dari 6,83 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen di tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun masih menyisakan tantangan struktural. Kalimantan Timur yang bergantung pada sektor pertambangan mengalami dampak ketika harga komoditas turun atau ketika terjadi perlambatan ekspor. Selain itu, peralihan ke sektor jasa dan industri pengolahan belum sepenuhnya mampu menampung lonjakan angkatan kerja.

Wilayah barat mengalami dinamika TPT tertinggi yang cukup mencolok. Jawa Barat mencatat TPT tertinggi nasional pada 2021 dengan angka 9,82 persen, menunjukkan tekanan tinggi terhadap pasar tenaga kerja akibat urbanisasi besar-besaran. Banten mengambil alih posisi ini pada 2022 dan 2023, dengan TPT masing-masing 8,09 dan 7,97 persen. Jawa Barat kembali pada 2024 sebelum digantikan oleh Kepulauan Riau pada 2025 dengan TPT sebesar 6,89 persen. Tingginya TPT di wilayah barat dipicu oleh konsentrasi penduduk, arus migrasi yang tinggi, dan ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas industri dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wilayah barat cenderung mencatat angka TPT tertinggi secara nasional, sedangkan wilayah tengah menunjukkan kestabilan dengan kecenderungan menurun. Wilayah timur menunjukkan fluktuasi yang berkaitan erat dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang kompleks. Data ini memperjelas perlunya pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat wilayah-spesifik untuk mengatasi tantangan dan potensi masing-masing kawasan. Selanjutnya terdapat provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling rendah di wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia selama periode 2021 hingga 2025.

Tabel 4. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Paling Rendah di Wilayah Timur, Tengah dan Barat Indonesia*

No.	Wilayah	Tahun	Provinsi	Jumlah (%)
1.	Timur	2021	Nusa Tenggara Barat	3,01
		2022	Nusa Tenggara Barat	2,89
		2023	Bali	2,69
		2024	Bali	1,79
		2025	Bali	1,58
2.	Tengah	2021	Sulawesi Barat	3,13
		2022	Sulawesi Barat	2,34
		2023	Sulawesi Barat	2,27
		2024	Sulawesi Barat	2,68
		2025	Sulawesi Tengah	3,02
3.	Barat	2021	Kepulauan Riau	4,25
		2022	Kepulauan Riau	4,40
		2023	Bengkulu	3,42
		2024	Bengkulu	3,11
		2025	Bengkulu	3,24

Data ini memberikan gambaran tentang wilayah yang berhasil menjaga stabilitas ketenagakerjaan meskipun menghadapi dinamika ekonomi nasional. Pola TPT rendah ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kapasitas ekonomi lokal. Di wilayah timur, Nusa Tenggara Barat mencatat TPT terendah pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 3,01 dan 2,89 persen. Pada 2023 hingga 2025 posisi ini diambil alih oleh Bali dengan penurunan signifikan dari 2,69 persen menjadi 1,58 persen. Rendahnya TPT di Bali mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pascapandemi dan penguatan sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja. Struktur ekonomi Bali yang berbasis jasa dan pariwisata memungkinkan perputaran ekonomi lebih cepat dibanding daerah lain di timur.

Wilayah tengah didominasi oleh Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan TPT terendah pada 2021 hingga 2024 dengan angka bervariasi antara 2,27 hingga 3,13 persen. Pada 2025 posisi ini bergeser ke Sulawesi Tengah dengan angka 3,02 persen. Wilayah ini menunjukkan stabilitas penyerapan tenaga kerja terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk. Ekonomi berbasis sumber daya lokal serta minimnya arus migrasi membuat tekanan terhadap pasar kerja relatif rendah.

Wilayah barat mengalami pergeseran dari Kepulauan Riau pada 2021 dan 2022 ke Bengkulu mulai 2023 hingga 2025. TPT Bengkulu berkisar antara 3,11 hingga 3,42 persen. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan penguatan ekonomi domestik berbasis perdagangan lokal dan jasa. Provinsi di wilayah barat dengan TPT rendah umumnya memiliki distribusi angkatan kerja yang seimbang dengan kapasitas penyerapan kerja, terutama di sektor informal dan UMKM.

Pola Sebaran Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi dan Terendah

Pola pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa wilayah dengan ekonomi yang lebih terdesentralisasi dan berbasis lokal cenderung memiliki TPT yang lebih rendah. Keberhasilan menjaga keseimbangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja berdampak langsung terhadap kestabilan sosial ekonomi. Distribusi beban ketenagakerjaan yang tidak terkonsentrasi pada sektor industri besar membuat wilayah ini lebih tangguh terhadap gejolak ekonomi eksternal. Data ini menguatkan urgensi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan. Sebagai pelengkap pemahaman terhadap fenomena tersebut, berikut disajikan tabel hasil pengolahan data sekunder dari BPS yang menggambarkan tingkat pengangguran terbuka di 38 provinsi Indonesia selama periode 2021 hingga 2025. Tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang perubahan posisi provinsi dengan TPT tertinggi setiap tahunnya. Data ini menjadi dasar analisis untuk mengidentifikasi pola spasial dan temporal pengangguran serta faktor-faktor penyebabnya. Informasi tersebut penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tertinggi di Indonesia

No.	Tahun	Nama Provinsi	Jumlah (%)
1.	2021	Kepulauan Riau	9,91
2.	2022	Jawa Barat	8,31
3.	2023	Banten	7,02
4.	2024	Banten	7,02
5.	2025	Papua	6,92

Pola tingkat pengangguran terbuka tertinggi bergeser dari Riau pada 2021 ke Jawa Barat (2022), Banten (2023), dan Papua (2025). Riau tinggi karena ketergantungan pada sektor ekstraktif yang rentan fluktuasi harga dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Jawa Barat dan Banten menghadapi ledakan angkatan kerja akibat urbanisasi cepat tanpa dukungan pelatihan dan penyerapan industri yang memadai. Papua mengalami pengangguran tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pengelolaan sumber daya manusia dan kurangnya sinergi antar sektor di wilayah dengan TPT tinggi. Provinsi-provinsi tersebut kurang mampu mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap dinamika lokal. Studi menunjukan ketimpangan pembangunan dan kurangnya diversifikasi ekonomi menjadi penyebab utama pengangguran tinggi di daerah-daerah tersebut (Zaky, 2023). Selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi, tahun 2021-2025 memiliki 5 provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terendah di Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 6. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terendah di Indonesia*

No.	Tahun	Nama Provinsi	Jumlah (%)
1.	2021	Bali	1,58
2.	2022	Bali	1,58
3.	2023	Papua Pegunungan	1,18
4.	2024	Papua Pegunungan	1,18
5.	2025	Bali	1,58

Tingkat pengangguran terbuka terendah terdapat di Bali pada tahun 2021 dan 2022, kemudian bergeser ke Papua Pegunungan pada 2023 dan 2024, dan kembali ke Bali pada 2025. Bali memiliki sektor pariwisata yang relatif stabil dan program pelatihan vokasi yang efektif, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lintas sektor. Papua Pegunungan menunjukkan angka rendah karena sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal dan subsisten, serta karakteristik sosial budaya yang berbeda. Kondisi geografis yang sulit diakses membatasi mobilitas tenaga kerja dan pencatatan pengangguran formal. Realita ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan lokal yang sesuai konteks wilayah untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Pembahasan

Faktor Geografis dan Demografis dalam Membentuk Kesenjangan Regional

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 38 provinsi di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan pola ketimpangan yang konsisten antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kesenjangan ini tercermin dari perbedaan mencolok antara provinsi dengan TPT tertinggi dan terendah tiap tahunnya. Pada tahun 2021, Riau mencatat TPT tertinggi di Indonesia. Provinsi ini mengalami tekanan ekonomi akibat penurunan aktivitas industri pengolahan dan pertambangan, terutama sawit dan minyak bumi. Sektor formal di Riau belum cukup menyerap tenaga kerja lokal. Ketimpangan distribusi pekerjaan antara kota dan daerah juga memperburuk kondisi pengangguran. Kemudian di tahun 2022, TPT tertinggi terjadi di Jawa Barat. Lonjakan penduduk usia kerja, urbanisasi tinggi, dan ketergantungan pada sektor industri padat karya yang terdampak pandemi mengakibatkan daya serap tenaga kerja tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja. Wilayah ini juga menanggung beban migrasi dari provinsi sekitar, seperti Banten dan DKI Jakarta (Mahmud et al, 2021).

Tahun 2023, provinsi Banten menempati posisi tertinggi dalam TPT. Banten menghadapi permasalahan struktural dalam transformasi ekonomi. Banyak kawasan industri besar mengalami stagnasi pasca-pandemi. Masuknya lulusan baru tidak diimbangi peningkatan lowongan kerja. Sektor informal tumbuh pesat namun tidak mengurangi pengangguran terbuka secara signifikan. Tahun ke 5 atau tahun 2025, Papua mencatat TPT tertinggi. Keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya investasi sektor swasta membatasi penciptaan lapangan kerja formal. Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan kejuruan memperparah ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Provinsi Bali konsisten mencatat TPT terendah pada 2021, 2022, dan 2025. Struktur ekonomi Bali yang berbasis pariwisata mampu menciptakan banyak lapangan kerja informal dan formal. Ketika sektor pariwisata pulih, penyerapan tenaga kerja kembali meningkat. Skala ekonomi lokal yang adaptif terhadap sektor jasa menjadi penopang utama. Tahun 2023 dan 2024, Papua Pegunungan memiliki TPT terendah di Indonesia. Fenomena ini tidak lepas dari tingginya angka pekerja informal dan tidak aktif secara ekonomi, serta rendahnya partisipasi angkatan kerja akibat keterbatasan akses pendidikan dan infrastruktur. Jumlah pencari kerja

aktif yang rendah membuat TPT secara statistik tampak kecil, walau tingkat produktivitas dan kualitas kerja tetap menjadi persoalan.

Data menunjukkan bahwa faktor geografis seperti keterjangkauan wilayah, infrastruktur, dan konektivitas memengaruhi penciptaan dan pemerataan lapangan kerja. Provinsi di wilayah barat lebih terdampak dinamika urbanisasi dan industrialisasi, yang seringkali menciptakan pengangguran struktural dan friksional. Di sisi lain, provinsi di wilayah timur cenderung menghadapi pengangguran tersembunyi dan tantangan dalam partisipasi angkatan kerja. Faktor demografis seperti laju pertumbuhan penduduk usia kerja dan migrasi antarwilayah juga memperkuat kesenjangan regional. Ketimpangan akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan ketidaksesuaian keterampilan memperlebar jurang ketenagakerjaan antarprovinsi.

Hasil penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa kesenjangan regional dalam tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh faktor geografis dan demografis. Studi yang menunjukkan disparitas antara wilayah barat dan timur Indonesia berkaitan erat dengan perbedaan akses terhadap infrastruktur, kualitas pendidikan, serta tingkat industrialisasi (Mahmud & Pasaribu, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah barat, seperti Jawa dan Sumatra, cenderung mengalami pengangguran struktural karena pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi masif, dan ketergantungan pada sektor industri padat karya yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Sementara itu, wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara menghadapi keterbatasan akses geografis, minimnya investasi swasta, dan rendahnya partisipasi angkatan kerja yang menyebabkan tingginya pengangguran tersembunyi. Hal serupa juga dikemukakan oleh temuan yang menekankan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah berdampak pada ketidakmerataan kesempatan kerja dan menciptakan tekanan demografis di provinsi-provinsi dengan pertumbuhan penduduk usia kerja yang tinggi (Annazah & Rahmatika, 2019). Temuan ini mendukung pola yang terlihat dalam data TPT tahun 2021–2025, di mana faktor struktural, spasial, dan demografis berkontribusi terhadap ketimpangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Penafsiran Konteks Wilayah Berdasarkan Data Sekunder

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di 38 provinsi Indonesia selama 2021–2025. menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan kondisi wilayah. Riau mencatat TPT tertinggi tahun 2021 karena ketergantungan pada sektor migas dan sawit yang tidak stabil. Penurunan aktivitas industri menyebabkan terbatasnya serapan tenaga kerja lokal. Sementara itu, Bali mencatat TPT terendah karena sektor pariwisata mulai pulih dan mampu menyerap banyak tenaga kerja, termasuk di sektor informal.

Tahun 2022, Jawa Barat mengalami TPT tertinggi karena tingginya urbanisasi, ledakan jumlah angkatan kerja, dan lambatnya pemulihan industri padat karya pasca pandemi. Persaingan tenaga kerja tinggi, sementara kesempatan kerja tidak seimbang. Di sisi lain, Bali tetap berada di posisi terendah karena ekonomi pariwisata kembali aktif. Adaptasi masyarakat terhadap sektor jasa memberi keuntungan dalam penyediaan lapangan kerja cepat. Tahun 2023, Banten memiliki TPT tertinggi akibat stagnasi kawasan industri dan minimnya inovasi sektor ketenagakerjaan. Relokasi industri ke luar daerah menyebabkan lonjakan pengangguran, terutama di kalangan usia muda. Papua Pegunungan mencatat TPT terendah karena banyak penduduk belum masuk pasar kerja formal. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal subsisten yang tidak tercatat dalam data resmi. Papua menjadi provinsi dengan TPT tertinggi tahun 2025. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, dan minimnya lapangan kerja formal menyebabkan angkatan kerja sulit terserap. Kesenjangan pendidikan dan akses

pelatihan memperparah kondisi ini. Bali kembali mencatat TPT terendah karena sektor jasa dan UMKM menunjukkan pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa wilayah dengan ekonomi dinamis belum tentu memiliki TPT rendah. Urbanisasi dan migrasi bisa menciptakan tekanan terhadap pasar kerja (Sundjaya, 2023). Wilayah yang lebih tertinggal secara statistik bisa menunjukkan TPT rendah karena rendahnya partisipasi angkatan kerja. Perbedaan struktur ekonomi, akses infrastruktur, dan kualitas SDM menjadi faktor utama dalam membentuk konteks ketenagakerjaan tiap wilayah.

Hasil penelitian sebelumnya mendukung penafsiran bahwa perbedaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) antarwilayah di Indonesia berkaitan erat dengan karakteristik struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian yang menunjukkan bahwa daerah dengan ekonomi berbasis sektor primer seperti pertanian atau sektor informal cenderung mencatat TPT yang lebih rendah secara statistik karena sebagian besar penduduk tidak terlibat dalam pasar kerja formal atau tidak aktif mencari kerja (Hastuti, 2025). Sementara itu, daerah dengan urbanisasi tinggi seperti Jawa Barat dan Banten menghadapi tekanan besar terhadap pasar kerja akibat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, ketimpangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta dampak relokasi industri. Studi lain juga menegaskan bahwa wilayah dengan infrastruktur ekonomi yang berkembang tidak selalu berhasil menekan TPT jika tidak diimbangi dengan inovasi sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM (Simanjuntak & Widodo, 2025). Di sisi lain, hasil kajian Syahputra et al. (2019) menunjukkan bahwa pemulihan sektor jasa dan pariwisata, seperti di Bali, mampu menciptakan peluang kerja yang luas dan cepat, terutama bagi pekerja informal dan UMKM. Oleh karena itu, dinamika TPT tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan wilayah dalam mengelola transisi struktural dan mendistribusikan peluang kerja secara inklusif.

Faktor Sosial dan Kelembagaan dalam Pola Pengangguran Terbuka

Pendidikan menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan seseorang untuk masuk pasar kerja formal. Riau mencatat TPT tertinggi tahun 2021 karena ketimpangan antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan industri lokal. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keterampilan vokasional yang sesuai. Pelatihan kerja terbatas dan belum menjangkau angkatan kerja di luar kawasan industri. Bali sebagai provinsi dengan TPT terendah tahun 2021 berhasil memanfaatkan pendidikan berbasis kejuruan dan pelatihan kerja sektor pariwisata. Usia angkatan kerja berperan besar dalam menciptakan dinamika TPT. Jawa Barat mencatat TPT tertinggi tahun 2022 karena dominasi penduduk usia muda yang baru memasuki pasar kerja. Dibuktikan dengan penelitian bahwa lulusan SMA dan perguruan tinggi meningkat tajam, namun permintaan tenaga kerja tidak sebanding (Utama et al, 2024). Banyak pencari kerja tidak memiliki pengalaman dan tersisih dalam persaingan kerja. Bali tetap menjadi provinsi dengan TPT terendah karena tenaga kerja usia produktif terserap di sektor jasa dan usaha mandiri.

Urbanisasi tanpa perencanaan memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Banten mencatat TPT tertinggi pada 2023 karena pertumbuhan penduduk di kawasan pinggiran tidak diimbangi ekspansi sektor industri. Seperti pada penelitian menunjukkan permukiman baru berkembang lebih cepat daripada lapangan kerja yang tersedia dan penduduk pendatang menambah beban pasar kerja (Hastuti, 2025). Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan TPT terendah karena mobilitas penduduk rendah dan banyak tenaga kerja tidak tercatat secara formal. Papua mencatat TPT tertinggi tahun 2025. Pendidikan rendah dan akses pelatihan sangat terbatas di

sebagian besar wilayah. Lembaga pendidikan belum mampu mencetak lulusan siap kerja. Urbanisasi belum terbangun, tapi ketimpangan antarwilayah dalam provinsi memperbesar jurang kesempatan kerja. Bali tetap mencatat TPT terendah karena kelembagaan lokal responsif dalam menghubungkan pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja.

Faktor sosial seperti pendidikan, usia kerja, dan urbanisasi saling berkaitan dalam menciptakan ketimpangan TPT. Provinsi dengan akses pendidikan berkualitas dan sistem pelatihan adaptif lebih mampu mengurangi pengangguran. Wilayah yang gagal mengelola urbanisasi dan tidak memiliki sistem dukungan transisi pendidikan ke dunia kerja justru menghasilkan TPT tinggi. Data ini menegaskan bahwa masalah pengangguran terbuka tidak hanya soal ekonomi, tapi juga kegagalan sistem sosial dan kelembagaan dalam menjembatani kebutuhan pasar kerja.

Penelitian sebelumnya secara jelas mendukung bahwa faktor sosial dan kelembagaan memainkan peran krusial dalam membentuk pola pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia. Studi lain juga menekankan bahwa ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan pendidikan menengah dan tinggi sulit terserap secara optimal (Sundjaya, 2023). Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pengangguran terbuka tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan sosial dalam memfasilitasi transisi dari pendidikan ke dunia kerja dan mengelola dinamika demografis serta urbanisasi.

Perbedaan Kapasitas Kelembagaan Daerah dalam Pengelolaan Tenaga Kerja

Kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola tenaga kerja sangat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Riau mencatat TPT tertinggi pada 2021 karena lemahnya koordinasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor industri. Program pelatihan kerja tidak tersambung dengan kebutuhan dunia usaha. Penempatan kerja tidak merata dan banyak lulusan tidak terserap di sektor lokal. Kelembagaan daerah belum mampu mengantisipasi perubahan pasar kerja pasca penurunan harga komoditas. Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi tahun 2022. Dinas ketenagakerjaan daerah belum optimal dalam memfasilitasi transisi lulusan ke dunia kerja. Banyak program pelatihan bersifat formalitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan industri besar. Keterlibatan sektor swasta dalam penyerapan tenaga kerja belum terbangun secara sistematis. Informasi pasar kerja tidak menjangkau seluruh pencari kerja, terutama di wilayah pinggiran kota. Banten mencatat TPT tertinggi pada 2023. Kapasitas kelembagaan rendah dalam mengatur migrasi penduduk ke wilayah industri baru. Lembaga pelatihan kerja belum berkembang dan tidak tersedia secara merata di seluruh kabupaten. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan UMKM dan industri kecil masih terbatas (Dewi et al, 2024). Sektor formal tidak cukup luas untuk menyerap lonjakan angkatan kerja setiap tahun.

Papua menjadi provinsi dengan TPT tertinggi tahun 2025. Kelembagaan daerah lemah dalam hal perencanaan tenaga kerja, pembangunan pusat pelatihan, dan penyaluran kerja. Infrastruktur lembaga pendidikan dan pelatihan kerja terbatas di luar kota-kota utama. Pendataan angkatan kerja belum akurat dan banyak lulusan tidak memiliki akses terhadap informasi lowongan kerja. Pemerintah daerah belum mampu mengembangkan strategi penyerapan kerja berbasis potensi lokal. Sebaliknya, Bali secara konsisten mencatat TPT terendah pada 2021, 2022, dan 2025. Kelembagaan ketenagakerjaan di Bali lebih responsif dan terkoordinasi antara sektor pendidikan, pariwisata, dan pelaku usaha lokal. Hal tersebut

dikuatkan dengan penelitian mengatakan bahwa melalui pelatihan dan program pengembangan, sektor swasta dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wika, 2024). Program pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, dan kepentingan bersama dapat tercapai. Lulusan sekolah kejuruan langsung terserap oleh sektor jasa dan pariwisata.

Pemerintah daerah aktif menyediakan pelatihan kerja yang relevan dan memperkuat peran UMKM sebagai penyerap tenaga kerja. Sistem informasi pasar kerja tersedia dan dapat diakses oleh pencari kerja di seluruh wilayah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah secara nyata memengaruhi pola pengangguran terbuka. Daerah dengan lembaga yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data mampu menurunkan TPT. Sebaliknya, daerah yang belum membangun sistem kelembagaan ketenagakerjaan yang kuat mengalami lonjakan pengangguran terbuka.

Narasi Data Sekunder Menunjukkan Ketimpangan Struktural

Data tingkat pengangguran terbuka selama lima tahun terakhir menunjukkan pola ketimpangan struktural antarwilayah. Provinsi dengan infrastruktur ekonomi kuat dan sistem tenaga kerja terorganisir lebih mampu menekan angka pengangguran. Provinsi dengan struktur ekonomi rapuh dan pelayanan kelembagaan terbatas cenderung mengalami lonjakan pengangguran. Ketimpangan ini tercermin dalam posisi provinsi dengan TPT tertinggi dan terendah yang berulang dalam periode berbeda.

Tahun 2021, Riau mencatat TPT tertinggi di Indonesia. Struktur ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam menciptakan lapangan kerja terbatas dan bersifat musiman. Ketika harga komoditas turun, tenaga kerja tidak terserap dan angka pengangguran naik. Sementara itu, Bali mencatat TPT terendah dengan ekonomi berbasis sektor jasa dan pariwisata yang menyerap tenaga kerja secara luas di sektor informal maupun formal. Tahun 2022, TPT tertinggi terjadi di Jawa Barat. Ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kemampuan sektor industri menyerap tenaga kerja menjadi faktor utama (Putri et al., 2024). Urbanisasi cepat menciptakan pusat pertumbuhan baru tanpa perencanaan lapangan kerja yang memadai. Bali tetap berada di posisi terendah karena pola kerja berbasis komunitas dan adaptasi terhadap usaha kecil yang tumbuh cepat.

Tahun 2023, Banten mencatat pengangguran terbuka tertinggi. Kawasan industri mengalami stagnasi akibat relokasi dan penurunan produksi. Penyerapan tenaga kerja tidak sejalan dengan jumlah lulusan baru yang meningkat. Papua Pegunungan mencatat TPT terendah karena sebagian besar penduduk tidak masuk dalam sistem pencatatan tenaga kerja formal. Papua menjadi provinsi dengan TPT tertinggi pada 2025. Struktur ekonomi belum berkembang merata dan sebagian besar wilayah tertinggal secara infrastruktur. Akses ke pendidikan dan pelatihan kerja masih rendah. Sementara itu, Bali kembali mencatat TPT terendah karena lembaga lokal mampu mengelola hubungan antara pendidikan dan dunia kerja secara efektif. Pola ini menegaskan ketimpangan struktural yang terjadi antara wilayah maju dan tertinggal di Indonesia (Mas & Pratiwi, 2023).

Interpretasi terhadap Kebijakan Lokal dan Pengaruhnya terhadap Pengangguran

Kebijakan lokal berperan penting dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi. Daerah yang memiliki kebijakan ketenagakerjaan terarah cenderung mampu menekan angka pengangguran. Riau pada 2021 mencatat TPT tertinggi karena tidak

ada diversifikasi ekonomi dan lemahnya pelatihan kerja. Jawa Barat pada 2022 juga mengalami lonjakan TPT akibat kebijakan vokasi yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan industri. Pemerintah daerah belum mampu mengelola urbanisasi dan ledakan angkatan kerja secara terstruktur.

Banten pada 2023 menunjukkan dampak dari tidak adanya kebijakan baru pasca menurunnya aktivitas industri. Migrasi masuk tidak diikuti pengembangan sektor ekonomi alternatif. Lembaga pelatihan kerja berjalan tanpa koordinasi dengan sektor usaha. Papua pada 2025 mengalami hal serupa, dengan minimnya kebijakan berbasis potensi lokal. Ketidakhadiran strategi tenaga kerja yang sesuai menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka. Sebaliknya, Provinsi Bali secara konsisten mencatat TPT terendah karena memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan terfokus. Pemerintah daerah aktif menjalin kerja sama antara pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha. Sektor pariwisata, jasa, dan UMKM didorong sebagai penyerap tenaga kerja utama. Regulasi yang mendukung ekonomi lokal mendorong perluasan lapangan kerja informal dan formal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah menentukan struktur dan dinamika ketenagakerjaan (Dewi & Nyoman, 2024).

Penafsiran Proyeksi dan Arah Perubahan TPT 2021–2025

Pemetaan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan pola pergeseran geografis dan perubahan tekanan tenaga kerja antarwilayah. Pada awal periode, pengangguran tertinggi terjadi di wilayah Sumatra dengan Riau sebagai puncaknya. Tahun berikutnya bergeser ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, dan berlanjut ke Banten pada 2023. Tahun 2025 mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, menandai pergeseran ke wilayah Indonesia timur. Wilayah yang tidak memiliki kesiapan infrastruktur dan strategi ketenagakerjaan mulai menunjukkan beban pengangguran yang meningkat.

Wilayah dengan TPT terendah didominasi Bali dan Papua Pegunungan. Bali konsisten menjadi provinsi dengan pengangguran terendah pada 2021, 2022, dan 2025. Dua tahun berturut-turut Papua Pegunungan mencatat posisi terendah karena karakter masyarakat dan rendahnya partisipasi formal dalam pasar kerja. Aktivitas ekonomi subsisten dan minimnya urbanisasi membuat angka TPT secara statistik tetap rendah. Bali menunjukkan tren stabil karena sektor pariwisata kembali pulih dan mampu menyerap tenaga kerja lintas usia dan pendidikan.

Arah perubahan TPT secara waktu mencerminkan bahwa tekanan pengangguran berpindah mengikuti dinamika pusat pertumbuhan dan distribusi penduduk. Kawasan industri yang jenuh mulai kehilangan kapasitas serap, sementara wilayah tertinggal mulai menghadapi tantangan baru akibat peningkatan akses pendidikan tanpa diiringi lapangan kerja. Provinsi dengan ketergantungan pada satu sektor ekonomi menunjukkan kerentanan terhadap gejolak pasar kerja. Ketimpangan antardaerah masih kuat terlihat, dengan provinsi di barat dan tengah lebih dinamis namun rawan fluktuasi. Provinsi timur perlahan mengalami peningkatan TPT seiring terbukanya akses, namun belum diimbangi kesiapan ekonomi lokal.

Penelitian sebelumnya mendukung temuan bahwa pergeseran geografis TPT dari barat ke timur Indonesia mencerminkan dinamika struktural dan kesiapan wilayah dalam menghadapi tekanan tenaga kerja. Studi yang menunjukkan bahwa wilayah industri padat karya di Jawa dan Sumatra mulai mengalami kejenuhan pasar kerja akibat urbanisasi berlebihan dan stagnasi

sektor manufaktur (Syahputra et al., 2019). Di sisi lain, hasil kajian yang menegaskan bahwa wilayah timur seperti Papua mulai mencatat peningkatan TPT seiring terbukanya akses pendidikan dan mobilitas, namun tanpa dukungan ekonomi lokal yang memadai (Fauziah et al., 2023). Sementara itu, provinsi dengan ekonomi berbasis pariwisata dan sektor jasa seperti Bali mampu mempertahankan tingkat pengangguran rendah karena adaptivitas sektor kerja informal dan kuatnya jejaring kelembagaan lokal. Pola ini menegaskan bahwa arah perubahan TPT sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktural, ketergantungan sektor, dan kemampuan daerah dalam mengelola transisi pembangunan ekonomi.

Provinsi dengan kecenderungan peningkatan atau penurunan TPT ditunjukkan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Riau menunjukkan kecenderungan penurunan TPT setelah puncak tinggi di 2021. Penurunan terjadi karena diversifikasi ekonomi mulai dilakukan dan investasi di sektor non-ekstraktif meningkat. Namun penyerapan tenaga kerja belum merata di seluruh kabupaten. Jawa Barat dan Banten memperlihatkan peningkatan TPT pada 2022 dan 2023. Urbanisasi pesat dan ledakan angkatan kerja muda tanpa dukungan pelatihan kerja memicu lonjakan pengangguran. Pertumbuhan industri belum mampu menyerap jumlah pencari kerja baru. Di Provinsi Papua mengalami peningkatan TPT signifikan menuju 2025. Infrastruktur yang belum berkembang dan terbatasnya akses pendidikan membuat angkatan kerja kesulitan menemukan pekerjaan. Ketergantungan pada sektor primer tetap tinggi tanpa pengembangan lapangan kerja alternatif. Bali justru menunjukkan penurunan TPT secara konsisten dari 2021 hingga 2025. Kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan sektor pariwisata yang stabil menyerap tenaga kerja lintas sektor dan usia. Pemberdayaan UMKM dan pelatihan vokasi menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Provinsi seperti Papua Pegunungan cenderung stabil dengan TPT rendah selama periode tersebut. Pola kerja masyarakat yang banyak bergerak di sektor informal dan subsisten mengurangi pencatatan pengangguran formal (Qomariyah, 2022). Namun potensi peningkatan tetap ada jika akses pendidikan dan pelatihan tidak ditingkatkan. Wilayah yang mengalami peningkatan TPT umumnya kurang mampu menyesuaikan kapasitas kelembagaan dan ekonomi lokal dengan pertumbuhan angkatan kerja. Wilayah dengan penurunan TPT berhasil melakukan adaptasi dan sinergi antara kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kajian mendalam terhadap penyebab perubahan berbasis konteks lokal, perubahan tingkat pengangguran terbuka di berbagai provinsi dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan sosial lokal. Riau mengalami peningkatan pengangguran akibat ketergantungan pada industri ekstraktif yang rentan fluktuasi harga komoditas. Perlambatan investasi sektor minyak dan gas menurunkan penyerapan tenaga kerja. Keterbatasan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal membuat lulusan sulit terserap pasar kerja. Jawa Barat dan Banten mencatat kenaikan pengangguran karena urbanisasi cepat tanpa dukungan pengembangan keterampilan memadai. Pertumbuhan penduduk usia produktif tinggi, tetapi sektor manufaktur dan jasa belum mampu menyerap secara optimal. Banyak pekerja muda mencari pekerjaan di kota tanpa pengalaman dan kualifikasi yang sesuai. Ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja memperburuk situasi. Papua menunjukkan kenaikan TPT karena infrastruktur pendidikan dan pelatihan masih terbatas. Sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian dan informal. Pemerintah daerah belum mampu menghadirkan program pengembangan keterampilan yang adaptif dengan potensi wilayah. Bali justru mengalami penurunan TPT karena sektor pariwisata pulih dan ada sinergi antara kebijakan

pelatihan kerja dan dunia usaha. Keberhasilan Bali memperlihatkan pentingnya kelembagaan lokal yang responsif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Interpretatif untuk intervensi berbasis wilayah pada TPT tertinggi dan terendah, Wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Riau perlu fokus pada diversifikasi ekonomi. Pengembangan sektor non-ekstraktif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja harus diprioritaskan. Pelatihan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal menjadi langkah penting. Pemerintah daerah harus memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan sektor industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jawa Barat dan Banten membutuhkan intervensi yang mengatasi urbanisasi tanpa kendali. Program pelatihan kerja bagi angkatan muda yang mengacu pada peluang kerja di sektor manufaktur dan jasa harus diperluas. Penguatan kemitraan dengan pelaku usaha akan membantu menyelaraskan keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar. Pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan di wilayah pinggiran juga sangat diperlukan. Papua harus mengembangkan akses pendidikan dan pelatihan di daerah terpencil. Program berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Bali dapat menjadi model dengan mengoptimalkan kolaborasi sektor pariwisata, UMKM, dan pelatihan kerja untuk mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan secara nasional, namun tidak merata di seluruh provinsi. Temuan ini sesuai dengan tujuan awal penelitian, yaitu untuk memetakan arah proyeksi TPT di 38 provinsi dan mengidentifikasi faktor penyebab perbedaannya secara spasial. Data menunjukkan bahwa wilayah barat, seperti Jawa Barat dan Banten, masih menghadapi tekanan tinggi akibat urbanisasi dan meningkatnya jumlah angkatan kerja muda. Sebaliknya, wilayah timur seperti Papua tertinggal dalam perbaikan TPT karena keterbatasan infrastruktur dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Bali muncul sebagai contoh positif berkat kombinasi kebijakan daerah yang adaptif, program pelatihan vokasi yang relevan, serta pemulihan sektor pariwisata.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan pengangguran tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan lokal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder agregatif, yang kurang menggambarkan aspek mikro dari dinamika pasar tenaga kerja, seperti karakteristik individu pencari kerja atau jenis pekerjaan informal. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan pendekatan kuantitatif berbasis data mikro untuk memperdalam pemahaman atas faktor determinan TPT. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis lokalitas, mengembangkan sektor ekonomi alternatif yang inklusif, serta memastikan akses terhadap informasi pasar kerja yang akurat dan real-time. Praktik baik dari daerah seperti Bali dapat dijadikan model dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang resilien dan berkelanjutan.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Abdi, M., Zai, B., Siregar, F. A., & Sihombing, R. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, IPM dan UMR Terhadap TPT di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011–2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 205–216. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3090>
- Alam, S., Ramadhani, W. P., & Patmaniar, P. (2023). Transformasi Digital UMKM Di Indonesia Selama Pandemi. *Journal Social Society*, 3(2), 140–156. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.344>
- Annazah, N. S., & Rahmatika, N. (2019). Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran Dan Inflasi: Studi Kasus Di Asean 7. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(2), 559948.
- Arjuna, A., Putri, N. T., Yenisa, P., & Noviarita, H. (2023). Dinamika Kependudukan Dan Dampak Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(1), 128–135.
- Arsyad, S. N. S., & Ahmad, B. (2024). Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 285–295. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i2.37>
- Azizah, R. A., Raissa, A., Andika, D. H., Refinaldi, A., & Atriani, D. (2024). Strategi penanaman modal di indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Inovasi Global*, 2(5), 580–591. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i5.92>
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, index pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Tahun 2000–2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dewi, I. G. A. A. Y., & Nyoman, M. S. I. (2024). Kolaborasi Triple Helix Dalam Program Inovasi Desa (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 253–262. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.13762>
- Fauziah, S. G., Padmi, M. F. M., & Agustin, D. A. C. (2023). Eksistensi Integrasi Ekonomi ASEAN Pada Aspek Economic Security di Indonesia Tahun 2020–2021. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 9(1), 97–111. <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6877>
- Haikutty, F., Madubun, J., & Tuhumury, J. J. (2024). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Angka Pengangguran Di Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.30598/jgssvol3issue2page101-112>

- Handayani, K. (2024). Strategi adaptif untuk mempertahankan tenaga kerja di era society 5.0: Menghadapi tantangan cobot. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(3), 185-200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i3.50>
- Hastuti, D. (2025). Analisis Bibliometrik Migrasi dan Transformasi Kependudukan Global. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 20(1), 1-38. <https://doi.org/10.22437/jpe.v20i1.43969>
- Jabani, B. A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2024). Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 8(3), 213-225. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.3.213-225>
- Kurniawan, M., Noviarita, H., & Anriyani, Y. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Pergeseran Sektorial Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Area Sumbagsel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2023. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(2).
- Mahmud, A., & Pasaribu, E. (2021). Permodelan spasial pada analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka provinsi bangka belitung tahun 2018. *Engineering, MAtematics and Computer Science Journal (EMACS)*, 3(2), 47-58. <https://doi.org/10.21512/emacsjournal.v3i2.7034>
- Mas, I. G. A. M. A., & Pratiwi, A. (2023). Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 4(2), 136-152. <https://doi.org/10.51172/jbmb>
- Putri, D. D., Wijaya, S. E., Sofiah, S., Aini, Q., & Bahrul, U. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan*, 316-325. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.68>
- Qomariyah, S. (2022). Analisis pengelolaan pasar tradisional dan sumber daya pedagang terhadap pendapatan pedagang pada pasar tradisional Boyolangu Kabupaten Tulungagung. *Otonomi*, 22(1), 12-23. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v22i1.2396>
- Simanjuntak, S. H., & Widodo, W. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.392>
- Sundjaya, H. (2023). Migrasi Dan Urbanisasi Dalam Pandangan Ekonomi Sumber Daya Manusia. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 71-89.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167-185. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>
- Syahputra, A., Erfit, E., & Nurhayani, N. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 95-106. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i2.8323>

- Tutupoho, A. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pdrb Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Jurnal Cita Ekonomika*, 13(2), 71-93. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v13i2.2613>
- Utama, A. S. W., Purnomo, P., & Muluk, M. S. (2024). Analisis Daya Saing Akademi Komunitas Di Indonesia Melalui Kerangka Vrio: Wawasan Dari Siswa Sekolah Menengah Dan Praktisi MSDM. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 9(2), 188-198.
- Wika, M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah Perbatasan. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 11384-11395.
- Yani, A. S. F., & Ruslan, D. (2025). Pengaruh Perekonomian Mikro dan Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 367-377. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1201>